

Diskominfo Kota Bandung Kantongi Bukti Video Aksi Vandalisme Babakan Siliwangi

BANDUNG (IM) - Kepala Diskominfo Kota Bandung, Yayan A Brilyana mengaku telah mengantongi bukti rekaman video aksi vandalisme Babakan Siliwangi.

"Pelaku dalam video aksi vandalisme Babakan Siliwangi di Bandung ini sedang kita cari. Videonya sudah kita dapat. Kita akan koordinasi dan melaporkan," kata Yayan, Jumat (30/9).

Apabila pelaku dalam video aksi vandalisme Babakan Siliwangi itu berhasil diidentifikasi dan ditangkap, pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat terkait agar pelaku menjalani hukuman sesuai aturan yang berlaku.

"Nanti kalau sudah ditangkap, kita mau infokan ke Satpol PP agar selanjutnya mereka bisa diproses untuk menjalani sidang tindak pidana ringan," ucapnya.

Tak hanya itu, Yayan menyebut ada salah satu

donatur yang ingin memberikan hadiah bagi siapapun yang bisa merekam dan melaporkan aksi vandalisme. Terlebih, aksi vandalisme sangat merusak estetika Kota Bandung.

"Saya mau tetap mencari orang dengan bantuan masyarakat yang melakukan vandalisme. Ada donatur yang datang ke saya, dan menawarkan hadiah uang tunai kalau ada yg menangkap pelaku," ujar dia.

Diketahui, aksi vandalisme kembali terjadi di Jalan Babakan Siliwangi. Mural cantik warna-warni di sepanjang jalan tersebut kembali dirusak oknum warga tak bertanggungjawab.

Mural di tembok sepanjang 476 meter hasil kreasi seniman John Martono itu telah dikotori tulisan-tulisan menggunakan cat semprot hitam pada Jumat 30 September 2022 dini hari. ● pra

Jadi Kado Terindah, KPU Kota Bogor Juara 1 Nasional Penggunaan LPSE

BOGOR (IM) - KPU Kota Bogor ditetapkan menjadi Juara 1 Nasional Penggunaan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Penghargaan diberikan langsung Ketua KPU, Hasyim Asy'ari kepada Ketua KPU Kota Bogor, Samsudin.

Samsudin menyebutkan, penghargaan Juara 1 Nasional Penggunaan LPSE itu diterima KPU Kota Bogor saat Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Tahapan Logistik Pemilu Serentak Tahun 2024 di Highland Park Resort, Kabupaten Bogor.

Dia menjelaskan, penghargaan untuk KPU Kota Bogor sebagai Juara 1 Nasional Penggunaan LPSE itu menjadi kado indah pada pada tahapan awal Pemilu 2024.

"Ini menjadi motivasi luar biasa bagi kami untuk memastikan Pemilu 2024 di Kota Bogor sukses tanpa pakses," kata Samsudin, Jumat (30/9).

Samsudin menerangkan, LPSE adalah unit layanan pe-

nyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa yang didirikan oleh Kementerian atau Lembaga atau Perguruan Tinggi atau BUMN dan Pemerintah Daerah.

"Tujuan LPSE adalah untuk memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa," terang Samsudin.

Sedangkan, Sekretaris KPU Kota Bogor, Hangga Pramaditya menuturkan pada Pemilu 2024 itu KPU Kota Bogor diproyeksikan akan mengelola 800 ribuan pemilih, 4.000 an TPS yg tersebar di kecamatan, dan kelurahan se-kota Bogor.

"LPSE memudahkan kami dalam mengelola logistik pemilu 2024.

"Dengan LPSE yang baik, diharapkan proses-proses pengadaan dapat dilakukan secara baik. LPSE tentunya akan menjamin proses pengadaan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien," ujarnya. ● gio



IDN/ANTARA

DAMPAK KENAikan HARGA KEDELAI

Perajin menyelesaikan produksi tahu di Sentra Produksi Tahu Cibuntu, Babakan Ciparay, Bandung, Jawa Barat, Jumat (30/9). Perajin tahu di Sentra Tahu Cibuntu Kota Bandung mengeluh karena mahalnya kacang kedelai impor yang saat ini sudah mencapai Rp12.800 per kilogram dari harga Rp10.500 per kilogram yang menyebabkan turunnya jumlah produksi.

Dinkes Bandung Kekurangan Vaksin Covid-19 Booster

BANDUNG (IM) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung mengungkapkan kekurangan vaksin Covid-19 booster. Akibatnya, kegiatan vaksinasi booster tahap satu atau dua relatif berjalan tidak semesif seperti awal-awal kegiatan vaksin.

"Intinya kurang (vaksin booster)," ujar Kepala Dinkes Kabupaten Bandung, Grace Mediana saat dihubungi, Jumat (30/9).

Ia mengungkapkan, pihaknya memperkirakan kondisi yang dialami Dinkes Kabupaten Bandung juga dialami dinas kesehatan lain di Jawa Barat. Saat ini vaksin yang tersedia hanya jenis vaksin Johnson dan Coronavac tetapi terkait jumlah pihaknya belum dapat memastikan berapa yang tersedia.

"Sama mungkin hampir seluruh Jabar saat ini yang ada hanya vaksin Johnson, Corona itu juga ketersediaannya tidak banyak," katanya.

Pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat agar dikirimkan vaksin

booster. Saat ini, pihaknya masih menunggu kabar penyaluran vaksin." Kami sudah meminta ke Dinkes Jabar permohonan tinggal menunggu," ungkapnya.

Grace mengatakan, pihaknya masih melakukan kegiatan vaksinasi booster di puskesmas namun tidak masif. Mereka yang ingin divaksin dapat terlebih dahulu mendatangi puskesmas untuk menanyakan ketersediaan vaksin. "(Vaksinasi) masih dengan vaksin yang ada pergerakan tidak semesif dulu. Bagi yang mau vaksin ke puskesmas silakan bertanya dulu ke puskesmas terdekat," katanya.

Ia mengatakan puskesmas saat ini menyelesaikan vaksinasi sisa vaksin atau stok yang ada. Apabila penyaluran vaksinasi sudah dilakukan Pemprov Jabar maka puskesmas akan segera melakukan sosialisasi.

"Ada hikmahnya juga sambil menunggu karena saat ini dikejar BIAN jadi tenaganya (petugas) konsen ke situ," katanya. ● pra

8 | Nusantara

IDN/ANTARA



LATIHAN TIMNAS JELANG KUALIFIKASI PIALA ASIA AFC U-17

Sejumlah pesepak bola Timnas sepak bola U-17 melakukan sesi latihan di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (30/9). Latihan tersebut sebagai persiapan dalam kualifikasi Piala Asia AFC U-17 grup B yang dilaksanakan dari tanggal 3-9 Oktober 2022.

Bendahara Desa Pangaur Kab. Bogor Bawa Kabur Uang BLT Rp405 Juta

Kepala Desa Pangaur, Jajat Supriyatna mengaku sudah melihat kecurigaan terhadap Bendahara Desa HH saat melakukan pembayaran pajak pembangunan tahun 2021 sebesar Rp28 juta dan Rp17 juta di tahun 2022. Banyak pengambilan uang desa dengan tanda tangan palsu yang diduga dilakukan pelaku.

BOGOR (IM) - Bendahara Desa Pangaur, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, berinisial HH jadi buronan usai membawa kabur uang desa sebesar Rp405 juta, terdiri dari uang Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga gaji para pegawai desa.

Kasie Pemerintahan Kecamatan Jasinga, Sandi Praja membenarkan informasi ini. Menurutnya, pihak desa dan kecamatan telah melakukan berbagai upaya, seperti meminta bantuan kepada keluarga bendahara desa tersebut.

"Nilainya itu sekitar Rp405 juta. Meliputi BLT, siltap, gaji

pegawai sampai dana lain yang menjadi keperluan desa," kata Sandi Praja, Jumat (30/9).

Dia menuturkan, pertemuan dengan keluarga bersangkutan sudah dilakukan, tapi belum ada solusi terbaik terkait uang yang dibawa kabur.

"Memang oknum bendahara ini orang lama dan sudah dipercaya desa. Kami minta Pemdes harus terbuka kepada masyarakat terkait masalah ini agar tidak terjadi fitnah," tuturnya.

Mereka juga masih menunggu laporan lanjutan dari desa karena akan ada

pertemuan kembali dengan keluarga yang bersangkutan.

"Kasus ini sudah dilaporkan ke Polsek Jasinga. Sejak awal keluarganya tidak objektif, makanya bakal dilakukan pertemuan dengan desa dan aparat lain," paparnya.

Sementara itu Kepala Desa Pangaur, Jajat Supriyatna mengaku sudah melihat kecurigaan terhadap HH saat melakukan pembayaran pajak pembangunan tahun 2021 sebesar Rp28 juta dan Rp17 juta di tahun 2022.

"Biasanya ada bukti pembayaran ke saya, untuk bayar pajak pembangunan setelah dua hari. Tetapi sudah seminggu dihubungi tidak bisa terus," keluhnya.

Bahkan, Jajat sempat mendatangi Bank BRI di Kecamatan Jasinga dan menerima hasil print out keuangan desa. Diketahui banyak pengambilan uang desa dengan tanda tangan palsu yang diduga dilakukan pelaku.

"Tanggal 12 September saya datang ke bank dan minta print out rekening Koran. Ternyata banyak pengambilan uang de-

ngan dokumennya palsu, termasuk tanda tangan saya dipalsukan dan surat kuasa," kata Jajat.

Menurut Jajat, total uang keluar yang dilakukan pelaku sudah berlangsung dari tanggal 9, 10, 18, 22, 25 Agustus sampai

1 September 2022 tanpa pemberitahuan ke desa.

"Yang jelas dia sudah melakukan pengambilan uang tanpa sepengetahuan dengan keseluruhan Rp405 juta," katanya. ● gio

Atty Somaddikarya Sebut Penertiban PKL Jalan Cifor di Bogor Grusak Grusuk

BOGOR (IM) - Anggota DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya geram dengan penertiban PKL Jalan Cifor pada Rabu (28/9). Dia menilainya Pemkot Bogor grusak grusuk.

Atty Somaddikarya mengatakan, sedikitnya ada 160 PKL yang terkena penertiban PKL Jalan Cifor yang ditertibkan Pemkot Bogor. Aksi grusak grusuk itu diakui untuk memuluskan rencana pembangunan pedestrian sepanjang 1,7 km di kawasan itu.

Seharusnya, Atty Somaddikarya menegaskan Pemkot Bogor tidak grusak grusuk melakukan penertiban PKL Jalan Cifor. Dia menuturkan sebaiknya ditentukan PKL mana saja yang akan ditertibkan. Zona mana saja yang tidak ada payung hukumnya yang tidak sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang tertuang di Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

"Ini yang harus jadi catatan, rakyat tidak akan datang ke rumah rakyat kalau dia merasa mendapatkan keadilan. Tidak ada kesulitan rakyat kalau tidak Pemkot sendiri yang jadi biang keroknya, sementara Pemkot adalah mitra kerja legislatif.

Pemkot Bogor juga tidak mau disalahkan sebagai biang kerok disetiap masalah," jelas Atty Somaddikarya, Jumat (30/9).

Dia melanjutkan, segala sesuatunya harus dipikirkan secara matang dan terukur. Pasalnya, penertiban PKL Jalan Cifor itu harus disertai tanggung jawab dan harus dipikirkan relokasi yang memanusiakan manusia.

"Jadi ketika eksekusi terjadi, jangan sampai relokasi disiapkan tanpa perencanaan," tegasnya.

Atty Somaddikarya menyebutkan, permasalahan ini harus diselesaikan dengan kepala yang dingin, mengingat relokasi dianggarkan sebesar Rp4 miliar dan penataan PKL sebesar Rp20 miliar di APBD 2023. Ini dikatakan dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kota Bogor bersama OPD terkait dan perwakilan sejumlah PKL kemarin.

"Dianggarkan Rp20 miliar dari APBD, Dewan akan coret. Untuk apa itu jika mengganggu rakyat. Untuk apa dianggarkan tapi akhirnya mengorbankan PKL. Jadi anggaran dari rakyat, untuk rakyat, tapi untuk apa jika memberangus perut rakyat," jelasnya. ● gio

Ini Penjelasan Ahli soal Penyebab Pergerakan Tanah di Bojongkoneng

BOGOR (IM) - Peneliti dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyebut pergerakan tanah di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakanmadang, Kabupaten Bogor, memiliki dampak mengerikan bagi kehidupan warga yang tinggal di sekitarnya. Fenomena itu berpotensi merobohkan hingga menelan bangunan-bangunan yang ada di sana.

"Bukan cuma bangunan yang roboh. Tapi bisa jeblos ke dalam itu membahayakan," kata Peneliti Bumi Madya PVMBG, Agus Budianto, Jumat (30/9).

Menurut Agus, fenomena pergerakan tanah yang sempat merusak beberapa bangunan dan jalan desa pada Rabu (14/9) disebabkan longsor tipe rayapan tanah.

"Kita lihat adanya fondasi dari batuan tanah yang bergerak, dan kita menemukan adalah lapisan lempung di situ. Nah lapisan lempung itulah yang merupakan bidang gencir yang ada di sana," jelasnya.

Vegetasi Hilang

Agus menerangkan, ketika vegetasi di wilayah Bojongkoneng hilang, maka air hujan dengan intensitas tinggi dapat membuat permukaan tanah menjadi jenuh. "Air bergerak dengan mudah dan membawa lapisan tanah di bawahnya yang didasari lapisan lempung," jelas.

Dia mengimbau agar ma-

Naik Rp500 Miliar, DPRD Sahkan APBD Perubahan 2022 Kota Bogor

BOGOR (IM) - DPRD Kota Bogor mengesahkan APBD Perubahan 2022 sebesar Rp3 triliun.

Angka ini mengalami kenaikan Rp500 miliar dari APBD 2022 Kota Bogor yang nilainya Rp2,5 triliun.

Kenaikan ini bersumber dari dana transfer daerah sebesar Rp350 miliar dan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp150 miliar.

Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengatakan, APBD Perubahan sebesar Rp3 triliun ini terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp2,7 triliun, dan pembiayaan netto sebesar Rp360 miliar.

Dengan adanya kenaikan anggaran ini, Atang melanjutkan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor meminta kepada Pemkot Bogor agar dapat memaksimalkan penggunaan dana BTT.

"Anggaran BTT harus digunakan secara maksimal,

tepat dan cepat, mengingat kasus-kasus bencana yang ada di Kota Bogor perlu segera mendapatkan penanganan yang serius. Jangan sampai sudah dianggarkan, namun karena proses birokrasi yang rumit, program tidak bisa dilaksanakan," kata Atang dalam keterangannya, Jumat (30/9).

Tak hanya itu, DPRD juga meminta kepada Pemkot Bogor untuk menambatkan anggaran sebesar Rp2 miliar ke program penanggulangan dampak inflasi akibat kenaikan BBM yang sudah disiapkan sebelumnya sebanyak Rp4,6 miliar.

"Program penanggulangan dampak inflasi akibat kenaikan BBM ini perlu diperkuat dan harus dilaksanakan sesegera mungkin. Selain dalam bentuk padat karya, program voucher BBM ini menyasar driver ojol dan pengemudi angkot. Jadi data itu harus benar-benar akurat dan tepat sasaran juga," ujarnya.

Atang menuturkan,

Banggar DPRD Kota Bogor menyayangkan dan memperingatkan khusus bagi perangkat daerah yang tidak siap dalam penyajian data maupun penyaluran program pemberian bantuan sosial bagi masyarakat terdampak BBM (non-DTKS).

"Padahal di sisi lain kemampuan APBD masih memungkinkan untuk dianggarkan dan diharapkan bisa mengcover lebih banyak warga yang belum menerima bantuan dari Pemerintah Pusat," tegas Atang.

Terakhir, untuk pos belanja yang tidak termasuk dalam RKPd dan KUA PPAS Perubahan, namun dikarenakan adanya ketentuan Inpres Nomor 7 Tahun 2022 dan PMK Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022), DPRD Kota Bogor meminta kepada Pemkot Bogor agar penetapan dan pelaksanaannya sesuai dengan regulasi yang berlaku. ● gio

IDN/ANTARA



PENEMUAN BUNGA SUWEG DI DEPOK

Warga memfoto bunga suweg (*Amorphophallus paenifolius*) yang tumbuh di kebun warga di kawasan Taman Merdeka, Depok, Jawa Barat, Jumat (30/9). Bunga suweg setinggi 50 sentimeter tersebut ditemukan warga sekitar pertama kali pada 27 September 2022.